

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kota merupakan wilayah dinamis, yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Perkembangan kota tidak hanya mencakup perubahan fisik, tetapi juga ekonomi, sosial maupun budaya yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Kehidupan kota menawarkan perubahan dan perkembangan yang menarik bagi sebagian masyarakat sehingga arus perpindahan penduduk menjadi bagian dari perkembangan kota. Daya tarik kota menjadi faktor strategis yang melandasi masyarakat berpindah. Perkembangan kota yang dinamis menyebabkan timbulnya masalah kependudukan yaitu persebaran penduduk yang tidak proposional yang berbuah pada kompleksitas problematika kota. Fenomena problematika kehidupan perkotaan menggambarkan permasalahan sosial mencakup kemiskinan, pengangguran, perumahan kumuh (*slum*), pemukiman liar (*squatter settlement*), jarak sosial (*social gap*) antar kelompok masyarakat yang lebar, kriminalitas, hingga kesenjangan ekonomi, sosial dan budaya (Asrinaldi, 2012, hlm. 2).

Problematika perkotaan, menggambarkan masyarakat yang heterogen, baik pada segi sosial maupun ekonomi. Heterogenitas tersebut mengakibatkan kesenjangan, tidak saja pada kondisi sosial budaya saja, namun juga lingkungan fisik. Kesenjangan yang terjadi menjadi bagian dari adanya perubahan stuktur kota, yang mengarah pada kemerosotan lingkungan permukiman yang dapat menurunkan kualitas kota itu sendiri. Selain itu, adanya permukiman kumuh disebabkan permasalahan yang sifatnya multidimensional karena seluruh sektor dianggap saling berkaitan satu sama lain baik sektor ekonomi, sosial sampai lingkungan yang saling mempengaruhi. Permasalahan yang multidimensional tersebut tidak hanya berdampak pada segi lingkungan saja, tetapi dari adanya permukiman kumuh

menggambarkan bahwa suatu wilayah dikategorikan sebagai wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.

Gambaran problematika kota pun terlihat jelas di kota Jakarta. Sebagai ibukota negara Indonesia yang merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian, seharusnya ada sebuah jaminan akan kenyamanan dan kemudahan dalam segala aspek untuk menunjang kehidupan mereka sehari-hari. Masyarakat pendatang yang bermigrasi ke Jakarta menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, “pada tahun 2012, 2013, dan 2014 angka urbanisasi ke Jakarta terus naik meski dalam jumlah sedikit. Namun sejak tahun 2015 angka urbanisasi terus berfluktuasi. Pada tahun 2015 angka pendatang baru berjumlah 70.504 orang (naik 2,87% dari tahun sebelumnya). Pada tahun 2016 turun 2,87% menjadi 68.763 orang. Pada tahun 2017 naik lagi menjadi 70.752 orang. Sejauh ini Pemprov DKI memprediksi tahun ini jumlah pendatang baru ke DKI akan naik 2% dari jumlah pendatang baru tahun 2017. Artinya tahun 2018 pendatang baru di DKI diprediksi berjumlah 72.167 orang” (kontan.co.id, 2018). Para masyarakat yang bermigrasi datang ke Jakarta seringkali datang tanpa dukungan modal dan keterampilan yang mumpuni. Sehingga sulitnya lapangan pekerjaan menjadikan meningkatnya pengangguran, dan mereka dianggap sebagai masalah baru. Mereka cenderung menjadi masyarakat miskin dan hidup di lingkungan kumuh sehingga keberadaannya termarginalkan. Kemiskinan pada permukiman kumuh menunjukkan gambaran tingginya arus urbanisasi, sehingga bagi masyarakat pendatang yang tidak mampu bersaing harus hidup di permukiman kumuh (Hilarius & Febrianty, 2013, hlm. 109).

Data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjukkan, bahwa terdapat 223 RW termasuk kategori kawasan kumuh di Provinsi DKI Jakarta yang tersebar di 181 kelurahan dari 261 kelurahan dengan luasan sebesar 1.024,52 Ha di kawasan DKI Jakarta (dalam Dokumen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Profil Kota Tanpa Kumuh Provinsi DKI Jakarta tahun 2017). Selain itu, menurut data *Global Power City Index* (GPCI) pada tahun 2018, Jakarta

merupakan ibukota di kawasan Asia Tenggara yang berada di urutan ke-41 dari 44 kota yang diukur dilihat dari aspek pengembangan, interaksi budaya, kelayakan huni, lingkungan, dan aksesibilitas. Dari data tersebut menunjukkan bahwa 70% kawasan Jakarta termasuk kawasan kumuh yang tidak layak huni.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menangani kawasan permukiman kumuh, antara lain dengan relokasi ke kawasan rusun hingga tindakan penggusuran. Namun, relokasi umumnya bersifat koersif dan dianggap tidak manusiawi. Langkah untuk mengatasi permukiman kumuh dengan cara “menggusur” dianggap cara yang kurang efektif karena sama saja hanya memindahkan ke lokasi yang baru sehingga tidak menyelesaikan masalah dan justru memperkuat kemiskinan struktural (Supriyanto, 2014, hlm. 51). Pemerintah juga cenderung menggunakan cara hukum seperti peraturan daerah yang dianggap legal dan jika tidak berhasil berujung pada pemaksaan penuh dengan praktik kekerasan (Andri, 2011, hlm. 50). Banyak masyarakat yang menolak penggusuran ini dikarenakan tempat mereka direlokasi dinilai jauh dari kawasan tempat mereka bekerja yang merupakan sumber kehidupan sehari-hari mereka. Masyarakat menilai pemerintah kurang melibatkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah ini, karena setelah mereka direlokasi tidak ada jaminan lainnya bagi masyarakat.

Kemiskinan yang terjadi di Jakarta menjadi dilematis, hal tersebut disebabkan bahwa Jakarta merupakan ibukota yang seharusnya antara pembangunan dan masyarakat seimbang perkembangannya. Namun, di Jakarta menunjukkan hal sebaliknya, yang mana taraf kesejahteraan masyarakatnya masih terdapat ketimpangan. Pelaksanaan strategi dan program dalam pengentasan kemiskinan pun dinilai belum berjalan optimal. Suyanto (2018) menganalisis terdapat tiga faktor yang menyebabkan program penanggulangan kemiskinan di Jakarta belum optimal, yaitu pertama karakteristik program yang cenderung lebih banyak program yang sifatnya amal dan karitatif daripada program yang benar-benar berorientasi pemberdayaan. Kedua, adanya deferensiasi struktural yang tidak banyak berkembang, sehingga menyebabkan peluang masyarakat miskin di Jakarta untuk

menembus sekat-sekat antarkelas menjadi terhambat. Dan, ketiga perkembangan Jakarta sebagai megapolitan yang makin tidak ramah kepada rakyat miskin. Dari analisis tersebut, secara tidak langsung bahwa rancangan strategi dan program pengentasan kemiskinan belum terfokus bagaimana cara menyelesaikan dalam jangka panjang. Seyogyanya masyarakat miskin seharusnya diarahkan untuk memiliki *power* sebagai upaya membangun manusia agar memiliki keterampilan (Setiadi & Kolip, 2011, hlm. 811). Upaya pembangunan manusia melalui pemberdayaan sebagai bentuk partisipasi aktif bersama dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik.

Gerakan sosial yang dilakukan oleh komunitas Jakarta Hidden Tour hadir sebagai sebuah fenomena agen perubahan sosial di tengah berbagai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat saat ini. Keberadaan gerakan sosial ini efektif sebagai alat untuk menuju sebuah transformasi sosial dengan menawarkan upaya pembangunan manusia. Transformasi sosial ini bisa berkaitan dengan ideologi, pranata sosial, sistem sosial, struktur sosial maupun kultur di tengah arus masyarakat yang dari waktu ke waktu menuju ke arah perubahan. Gerakan sosial ini dapat dianggap sebagai penyebab utama perubahan dan sebagai dampak sebuah gejala (Sztompka, 2011, hlm. 327). Maka dari itu, gerakan sosial ini mengarah pada tujuan sebagai proses perubahan yang disertai dari dampak sebuah perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Gerakan sosial dianggap sebagai alternatif sekelompok masyarakat guna mengatasi permasalahan sosial di masyarakat yang berkaitan dengan sebuah kebijakan (Manalu, 2007, hlm. 27). Sebagai komunitas, Jakarta Hidden Tour sebagai gerakan sosial menjadikan pariwisata sebagai fokus utama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kawasan permukiman kumuh Jakarta.

Konsep pariwisata kumuh yang digagas oleh Jakarta Hidden Tour mencoba menyajikan pariwisata yang tidak biasa dengan mengajak wisatawan untuk melihat realita Jakarta sesungguhnya tidak hanya gedung tinggi tetapi juga terdapat kawasan kumuh ditengah ibukota. Perjalanan wisata kumuh ini tersaji dengan

melihat realitas sesungguhnya berkaitan dengan aspek kemiskinan seperti apa dan bagaimana menghilangkan stereotip negatif mengenai lingkungan kumuh (Ma, 2010; Meschkank, 2011). Fenomena pariwisata kumuh atau dikenal dengan *slum tourism* lebih dahulu diperkenalkan di Brazil, India, Pakistan dan Filipina. Di Indonesia, Jakarta Hidden Tour juga hadir untuk menyajikan wisata kumuh sejak tahun 2008. Daerah yang dijadikan tempat wisata terdiri dari Kampung Bandan, Kampung Galur Senen di kawasan rel kereta api Pasar Senen, Kampung Pulo di kawasan sungai Ciliwung dan Kampung Luar Batang di kawasan Pasar Ikan Sunda Kelapa. Pariwisata kumuh ini dari tahun ke tahun berkembang yang peminatnya dominan para wisatawan asing. Tour ini menyajikan wisata selama 1 hari penuh dengan biaya Rp. 600.000 sampai Rp. 1.500.000 per tour. Keuntungan dari wisata ini digunakan untuk pengembangan masyarakat yang menjadi objek wisata kumuh.

Pengembangan masyarakat disajikan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial, pendidikan dan kesehatan. Perkembangan masyarakat ini menjadikan sebuah prospek wisata kumuh dengan cara mengajak masyarakat untuk berkembang melalui pemberdayaan masyarakat. Gerakan sosial yang digagas Jakarta Hidden Tour dalam bentuk pariwisata kumuh sangat menjunjung nilai kebersamaan, solidaritas dan interaksi antara masyarakat dan wisatawan, dengan adanya pertemuan sosial budaya, serta pengembangan kesadaran akan kemanusiaan, budaya, dan lingkungan melalui sebuah diskusi yang saling membangun. Masyarakat di daerah kumuh berperan untuk menjadi bagian dari adanya wisata kumuh sehingga anggapan adanya eksploitasi itu tidak benar (Darmawan & Nurhalin, 2016, hlm. 8).

Pariwisata kumuh menjadi wisata yang bertujuan untuk melihat realita nyata kemiskinan yang menjadi komoditi wisata. Konsep pariwisata kumuh mengkomoditikan kemiskinan sebagai objek wisata yang muncul di tengah dinamika globalisasi dan modernisasi (Pramadi & Kusumawardhana, 2018, hlm. 2). Pariwisata kumuh sebagai wisata alternatif yang memiliki penggemarnya tersendiri, dibuktikan dengan setiap tahun yang peminatnya terus bertambah. Namun jenis

wisata ini tidak hanya termotivasi untuk melihat dunia yang “sesungguhnya”, namun, terdapat kontroversi berupa anggapan mengenai eksploitasi kemiskinan (Tirto.id, 2016). Kontroversi menjadikan orang miskin sebagai objek wisata pun dianggap dapat merusak citra pariwisata dan menghina sebuah negara. Dengan adanya wisata kumuh dapat menimbulkan perdebatan di masyarakat yang menganggap wisata kumuh dianggap memiliki sisi positif dan sebaliknya tentu ada sisi negatifnya (Burgold & Rolfes, 2013). Keberadaan pariwisata kumuh bertentangan dengan terminologi pariwisata yang pada umumnya yang menyajikan keindahan dan kenyamanan sebuah destinasi. Pariwisata kumuh di Indonesia bertentangan dengan slogan promosi pariwisata di Indonesia yaitu “pesona Indonesia”. Namun, adanya pariwisata kumuh dianggap sebagai sarana kritik sosial dan alat propaganda karena ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kemiskinan di ibukota yang berpihak pada suara masyarakat. Adanya pariwisata kumuh ini mendapatkan penolakan keras dari pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga Kementerian Pariwisata. Seperti Jero Wacik yang merupakan mantan Menteri Pariwisata periode 2004 – 2009 sangat menolak keras keberadaan pariwisata kumuh yang digagas oleh Jakarta Hidden Tour ini, ia mengungkapkan bahwa “Itu tidak ada wisata kemiskinan. Kalau ada orang yang menggagas itu saya tidak setuju. Itu menghina kita” (detikNews, 2010). Resistensi oleh pemerintah terhadap keberadaan praktik gerakan sosial melalui pariwisata kumuh tergambar jelas bahwa dengan adanya pariwisata kumuh bukan dimaknai sebagai komoditas pariwisata semata. Hal itu dikarenakan bahwa, esensi pariwisata seharusnya bukan mempertontonkan kemiskinan semata tetapi seharusnya mempertontonkan keindahan sebuah negara sebagai komoditas pariwisata.

Di sisi lain, kehadiran Jakarta Hidden Tour ini merupakan sebuah gagasan yang menjadikan kaum marginal menjadi bagian dari komoditas pariwisata berupa gerakan sosial pariwisata kumuh. Gerakan sosial dipandang sebagai cara efektif untuk menentang sebuah kebijakan yang diterapkan dengan bentuk sebuah perjuangan dan politik *grass-root* yang juga melibatkan masyarakat yang terancam

keberadaannya (Singh, 2010, hlm. 132). Keberadaan Jakarta Hidden Tour dianggap sebagai cara untuk menyampaikan pendapat masyarakat di kawasan permukiman kumuh kepada pemerintah dengan tujuan agar lebih peka dan bergerak cepat untuk memberikan solusi setiap permasalahan masyarakat yang termarginalkan, selanjutnya tentu ada bentuk peringatan pada pemerintah yang dinilai lalai untuk mensejahterakan rakyatnya (Ramadhany, 2017, hlm. 6). Selama ini pariwisata hanya menampilkan sisi komersil semata tanpa melihat aspek sosial suatu kawasan wisata. Selain itu, pariwisata saat ini lekat dengan pengelolaannya yang tidak mengakomodir aspirasi dan keterlibatan masyarakat sekitar (Suryadana, 2013, hlm. 86). Pengembangan pariwisata seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, tidak hanya sarana pengenalan budaya tetapi juga harus membangkitkan tingkat perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.

Adanya gerakan sosial pariwisata kumuh yang dilakukan oleh Jakarta Hidden Tour, dianggap sebagai sarana dalam memberdayakan masyarakat. Pariwisata kumuh menjadi alternatif wisata yang menawarkan pengalaman alternatif tentang bagaimana wisatawan tidak hanya sekedar menikmati wisata saja, tetapi terdapat aspek pemberdayaan secara sosial dan lingkungan yang berkelanjutan (Lyons & Wearing, 2008). Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara menjadikan pariwisata menjadi komoditas dalam mengembangkan masyarakat. Pariwisata menjadikan masyarakat mampu untuk berdaya secara mandiri dengan cara keterlibatan dalam pengembangan pariwisata. Keikutsertaan masyarakat dalam pariwisata dinilai sangat penting, untuk kepentingan proses pembangunan pariwisata agar berkelanjutan. Pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*) menjadi pendekatan alternatif dalam memberdayakan masyarakat mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga pengambilan keputusan. Dalam rangka membangun konsep pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*) pendekatan pemberdayaan dinilai menjadi elemen terpenting untuk menciptakan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan fenomena realitas yang diuraikan oleh Peneliti, terdapat beberapa hal yang perlu disoroti yaitu; gerakan sosial yang dilakukan oleh komunitas Jakarta Hidden Tour melalui pariwisata kumuh sebagai wujud agen perubahan. Keberadaan gerakan sosial Jakarta Hidden Tour menyajikan pemberdayaan masyarakat kawasan permukiman kumuh yang tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut, secara tidak langsung akan menciptakan masyarakat yang sejahtera secara mandiri. Strategi pemberdayaan melalui gerakan sosial menjadi bentuk solidaritas terhadap masyarakat miskin kota (Cruikshank, 1999, hlm. 67). Selain itu, ada anggapan bahwa pariwisata kumuh dapat menciptakan proyek keberlanjutan dan peluang masyarakat untuk berdaya secara mandiri (Frenzel, 2013, hlm. 122).

Maka dari itu, muncul sebuah perspektif baru mengenai sudut pandang atau bagaimana cara kita memandang suatu hal. Perspektif baru dari berbagai sudut pandang yang dipakai untuk memahami fenomena-fenomena atau masalah-masalah mengenai kemiskinan ternyata bisa menjadi sebuah daya tarik yang disajikan melalui sektor pariwisata berbasis pengembangan masyarakat berupa sebuah pemberdayaan. Oleh karena itu, judul penelitian yang Peneliti ajukan adalah “Strategi Model Gerakan Sosial Pariwisata Kumuh dalam Pemberdayaan Masyarakat Kampung Akuarium Jakarta”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang disajikan, Peneliti menelaah mengenai masalah penelitian lebih terarah dan terfokus pada masalah penelitian yang akan diteliti, maka sub-sub masalah dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk resistensi yang dilakukan Jakarta Hidden Tour yang dibangun melalui pariwisata kumuh?
2. Bagaimana strategi gerakan sosial Jakarta Hidden Tour dalam melakukan resistensi melalui pariwisata kumuh?

3. Bagaimana peran gerakan sosial Jakarta Hidden Tour dalam membangun agensi dan pemberdayaan masyarakat Kampung Akuarium Jakarta melalui pariwisata kumuh?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Model Gerakan Sosial Pariwisata Kumuh dalam Pemberdayaan Masyarakat Kampung Akuarium Jakarta. Adapun yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan bentuk resistensi yang dilakukan Jakarta Hidden Tour terhadap kebijakan pemerintah yang dibangun melalui pariwisata kumuh.
2. Menganalisis strategi gerakan sosial Jakarta Hidden Tour dalam melakukan resistensi melalui pariwisata kumuh.
3. Menggali peran gerakan sosial Jakarta Hidden Tour dalam membangun agensi dan pemberdayaan masyarakat Kampung Akuarium Jakarta melalui pariwisata kumuh.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1.4.1 Aspek Teoritis

Dalam konteks aspek teoritis, kajian ini mengungkapkan bahwa gerakan sosial diimplementasikan melalui adanya sebuah komunitas yaitu Jakarta Hidden Tour yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat marginal di Jakarta. Inovasi yang ditawarkan oleh Jakarta Hidden Tour dengan menyajikan konsep pariwisata kumuh sebagai bentuk proses gerakan dalam wujud agen perubahan. Timbulnya resistensi terhadap praktik gerakan sosial Jakarta Hidden Tour perlu ditelaah lebih mendalam, karena konsep pariwisata yang kontroversial ini terdapat kajian tentang resistensi dan agensi masyarakat marjinal yang ingin dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa adanya Jakarta Hidden Tour bisa menjadi sebuah gerakan alternatif dalam menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah yang lamban menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.

Lingga Utami, 2019

STRATEGI MODEL GERAKAN SOSIAL PARIWISATA KUMUH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG AKUARIUM JAKARTA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya untuk memperkaya kajian ilmu pengetahuan yang lebih mendalam dan praktis sesuai dinamika masyarakat. Sumbangan terhadap pengembangan pengetahuan mengenai kajian gerakan sosial yang berfokus pada gerakan sosial dalam rangka mengatasi permasalahan sosial menjadi bagian dari menyikapi Perubahan Sosial, inovasi konsep pariwisata yang berfokus pada *community-based tourism* menjadi bagian dari pengembangan Sosiologi Pariwisata. Aspek pemberdayaan masyarakat marginal yang berfokus pada *community-based development* menjadi bagian dari pengembangan Pemberdayaan Masyarakat secara berkelanjutan.

1.4.2 Aspek Praktis

1. Peneliti, sebagai sarana dalam menambah wawasan salah satu kajiannya berkaitan dengan keilmuan sosiologi terapan yaitu Gerakan Sosial berkenaan dengan peran komunitas sebagai agen perubahan sosial, Sosiologi Pariwisata berkenaan dengan peranan sosiologi untuk mengembangkan pariwisata, dan Pemberdayaan masyarakat berkenaan dengan strategi pemberdayaan masyarakat kota.
2. Pendidik, sebagai kajian yang digunakan sebagai sarana media informasi mengenai kajian Perubahan sosial menggambarkan bentuk perilaku kolektif berupa gerakan sosial dalam rangka upaya pengentasan permasalahan sosial di masyarakat yang dinamis. Konsep pendidikan masyarakat disajikan melalui bentuk pemberdayaan masyarakat yang digunakan agar menciptakan agen pemberdayaan masyarakat agar memiliki kompetensi. Selanjutnya, adanya pembelajaran bagi Pendidik untuk mengajarkan peserta didik memahami permasalahan sosial yang lebih konkrit sesuai fakta lapangan di masyarakat yang mana hal tersebut merupakan bagian dari tujuan pembelajaran abad 21. Pembelajaran berbentuk proyek yang mengarahkan peserta didik untuk mampu memiliki keterampilan *problem solving*.

3. Program Studi Pendidikan Sosiologi, sebagai sumbangan terhadap pengembangan kajian ilmu pendidikan sosiologi mengenai perubahan sosial, sosiologi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam rangka pengentasan permasalahan sosial di masyarakat.
4. Masyarakat, sebagai media informasi untuk para masyarakat agar peka terhadap berbagai permasalahan sosial yang terjadi dan memahami bentuk gerakan sosial sebagai salah satu agen perubahan sosial yang dapat diwujudkan melalui pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan juga ada aspek pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

1.4.3 Aspek Kebijakan

Diharapkan aspek kebijakan yang tercantum pada penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Pemerintah, sebagai media informasi mengenai isu permasalahan sosial di ibukota yang menjadikan sebuah awal dari timbulnya gerakan sosial. Dan dikembangkan gerakan sosial berfokus pada aspek pariwisata dengan tujuan menjadi agen perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan pemerintah peka terhadap kondisi masyarakat marginal ibukota dan setiap permasalahan yang terjadi diselesaikan dengan *win-win solution*.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, sebagai media informasi mengenai isu permasalahan sosial di ibukota yaitu kawasan permukiman kumuh yang menjadi sebuah awal dari timbulnya gerakan sosial. Diharapkan, gerakan sosial ini menjadi sumber penentu kebijakan yang didasarkan pada penemuan-penemuan permasalahan yang terjadi.

1.4.4 Aspek Isu serta Aksi Sosial

Berkenaan dengan pembahasan mengenai resistensi dalam praktik gerakan sosial tentu menjadi alasan timbulnya gerakan sosial yang tentu sudah menjadi hal lumrah di era yang dinamis ini mengingat makin kompleksnya permasalahan sosial didalamnya. Sebagai sebuah isu sosial, permasalahan sosial ini menjadikan

Lingga Utami, 2019

STRATEGI MODEL GERAKAN SOSIAL PARIWISATA KUMUH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG AKUARIUM JAKARTA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

timbulnya gerakan sosial pada penelitian ini dianggap sebuah wujud agen perubahan sosial nyata untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat marginal ibukota. Keberadaan pariwisata kumuh tidak hanya bertujuan untuk masyarakat marginal itu sendiri agar mereka diberdayakan secara positif, tetapi ada “*warning*” bagi pemerintah maupun masyarakat lainnya agar lebih peka dan peduli untuk menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Realita nyata yang disajikan dalam wisata kumuh kental dengan nilai kemanusiaan. Lebih lanjut, aspek pemberdayaan disajikan dalam bentuk pariwisata berkelanjutan dengan upaya bagaimana seharusnya mensejahterakan rakyat dengan cara persuasif.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Struktur organisasi tesis ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menjelaskan:

1. Bab I yaitu Pendahuluan, terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta struktur organisasi tesis. Gambaran permasalahan dijelaskan sesuai dengan observasi awal diperkuat dengan kajian teoritis mengenai bagaimana keberadaan pariwisata kumuh yang digagas oleh Jakarta Hidden Tour mendapatkan penolakan dari beberapa pihak karena dianggap menampilkan kemiskinan. Namun, pada masalah juga diungkapkan tidak hanya kontroversinya saja tetapi juga sisi pro terhadap keberadaan gerakan pariwisata kumuh yang Peneliti sajikan.
2. Bab II Kajian Pustaka, berisi konsep-konsep dan teori-teori berkaitan dengan fokus masalah penelitian yang disajikan secara analitis yaitu mengenai resistensi pariwisata kumuh dalam praktik gerakan sosial, penelaahan kajian pustaka disajikan sesuai masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, penelitian terdahulu akan menjadi acuan dan perbandingan dalam menentukan fokus masalah yang akan dibahas oleh Peneliti. Penelitian terdahulu juga menunjukkan adanya orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh Peneliti. Agar lebih memudahkan dalam

menggambarkan masalah disajikan alur pikir dari kajian secara umum hingga khusus yang terfokus pada tujuan penelitian yang akan dicapai. Kajian pustaka ini menjadi dasar dalam melengkapi kerangka pembahasan untuk menyajikan Bab IV.

3. Bab III Metode Penelitian, menjelaskan desain pendekatan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penyajian lokasi penelitian diungkapkan secara rinci mengambil satu daerah di Provinsi DKI Jakarta yang menjadi binaan Jakarta Hidden Tour. Selanjutnya disajikan instrumen, teknik pengumpulan data hingga teknik analisis data yang disajikan secara praktis.
4. Bab IV yaitu Temuan dan Pembahasan, menguraikan temuan hasil penelitian sesuai data lapangan mengacu pada permasalahan dan metode penelitian yang dilakukan. Temuan penelitian diungkapkan sesuai data lapangan yang ada, dan akan menjadi acuan untuk pemaparan pembahasan. Pembahasan pun disajikan dengan analisis kajian teoritis, fokus kajian berkenaan dengan isu gerakan sosial. Analisis gerakan sosial, peneliti menggunakan kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, sehingga hasil temuan-temuan tersebut dihubungkan dengan teori-teori atau konsep yang dipilih sehingga hasil penelitian dapat lebih bersifat ilmiah.
5. Bab V yaitu Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi merupakan penutup dalam penelitian dengan menyajikan hasil temuan dan pembahasan pada Bab IV yang sudah disimpulkan disesuaikan dengan pertanyaan penelitian. Hasil penelitian juga dihubungkan dengan kajian sosiologi terapan yaitu perubahan sosial, sosiologi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk implikasi penelitian yang telah dilakukan. Dari penelitian yang telah dilakukan pun dijadikan sebuah rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan juga peneliti selanjutnya.